

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang berhak melakukan pertanggungjawaban hukum terhadap apa yang telah dilakukannya. Dalam perkembangannya, pidana menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks sebagai hak untuk membatasi setiap Hak Asasi Manusia.

Menurut Muladi dalam teori pidana integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang mengakibatkan kerusakan pada individu sosial.¹

Dalam hal ini penjatuhan pidana pada seseorang bukan semata-mata ditujukan untuk balas dendam terhadap apa yang dilakukan, namun yang terpenting adalah bagaimana melakukan pembinaan, melakukan perbaikan, bimbingan, dan pengayoman terhadap para pelaku tindak pidana. Dalam konsepsi baru tentang Pemasyarakatan pidana bukan lagi mengenai penjaraan namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pandangan pidana sebagai sarana pembinaan bagi terpidana banyak mempengaruhi sistem pembinaan di beberapa negara tak terkecuali Indonesia. Dengan adanya sistem kemasyarakatan yang telah menggantikan penjara sebagai

¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT Alumni, Bandung, 2008, hal. 53-55.

pemidanaan merupakan sebuah bukti akan hal itu. Perampasan dan pembatasan gerak seseorang ini ditujukan untuk membina terpidana agar menjadi lebih berguna dan bisa menjadi lebih baik lagi.²

Salah satu hak terpidana dalam pemasyarakatan adalah memperoleh Pembebasan Bersyarat atau Pelepasan Bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*), sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat mempunyai arti penting bagi terpidana untuk memperoleh perubahan sikap dan perilaku, tentang mengerti apa sesungguhnya arti menjalani pidana penjara itu. Tahap pembebasan bersyarat lebih tepat disebut sebagai tahap pembinaan masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang kurangnya dua pertiga masa pidana minimal 9 bulan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat tidak lepas dari kondisi lingkungan pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan sehingga diperlukannya suatu pengawasan dan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif.

Pembebasan bersyarat diberikan setelah narapidana menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana penjara dengan ketentuan masa 2/3 (dua per tiga) tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Namun dalam praktiknya tidak semua narapidana memperoleh Pembebasan Bersyarat meski telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana nya, terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu bagi Tim Pengamat

² Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 26

Pemasyarakatan dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan usulan Pembebasan Bersyarat narapidana kepada Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pandangan masyarakat terhadap pembebasan bersyarat merupakan akhir dari pidana atau hukuman terhadap narapidana sebelum masa pidana berakhir, sehingga masyarakat memandang bahwa Pembebasan Bersyarat sama dengan bebas murni atau mutlak. Oleh karena itu, di setiap kebijakan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana, kerap kali tidak dapat menerima karena dirasa tidak memenuhi keadilan masyarakat. Tanpa melihat bahwa Pembebasan Bersyarat merupakan suatu hak narapidana yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

Selain diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat juga diatur dalam pasal 15 hingga pasal 17 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dimana dalam pelaksanaan dilapangan atau praktik di lapangan sesuai dengan pasal 6 ayat (3) huruf b juncto pasal 42 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat akan menjalani serangkaian proses bimbingan yang dilakukan oleh BAPAS sehingga diharapkan narapidana yang bersangkutan siap kembali di tengah-tengah masyarakat.

Dilihat dari sisi pengawasan, Pasal 15 ayat (3) juncto pasal 14 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyatakan bahwa lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembebasan Bersyarat ialah

lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu lembaga Kejaksaan. Pentingnya pengawasan dalam hal Pembebasan Bersyarat yaitu guna terjaminnya narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dapat diterima kembali oleh masyarakat disamping agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan Pembebasan Bersyarat.

Keputusan mengenai Pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan, meminta rekomendasi dari instansi terkait yakni pihak Kepolisian dan/ atau Kejaksaan.

Kejaksaan sebagai salah satu instansi penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang. Tugas utama yang telah dikenal secara luas adalah sebagai lembaga yang melakukan penuntutan terhadap kasus-kasus pidana di Pengadilan. Akan tetapi selain melakukan penuntutan terhadap kasus pidana tugas penting lain juga dipegang oleh Kejaksaan antara lain, sebagai eksekutor suatu keputusan yang salah satunya adalah melakukan Pembebasan Bersyarat.

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam hal Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang menjelaskan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan di bidang pidana menyangkut dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

Adapun tujuan dari pembebasan bersyarat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.PK.04.10 Tahun 2007 menyebutkan bahwa :

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. Memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah bebas menjalani masa pidana;
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Jika dilihat berdasarkan tujuan dari pembebasan bersyarat tersebut adalah agar narapidana dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Agar tercapainya tujuan tersebut, maka perlu adanya suatu pengawasan dan pembimbingan yang efektif bagi narapidana pembebasan bersyarat tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kewenangan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat adalah kewenangan Kejaksaan. Pengawasan yang seperti apa yang dapat menjamin bahwa narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat tidak melakukan tindak pidana kembali ketika berada di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan diberikannya Pembebasan Bersyarat kepada narapidana serta adanya pengawasan yang dilakukan pihak Kejaksaan, seharusnya mampu meminimalisir terjadinya pengulangan tindak pidana kembali yang dilakukan

narapidana terlebih narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat. Hal tersebut yang membuat penulis mengangkat judul terkait “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang ?
2. Bagaimana efektifitas pengawasan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang ?
3. Apa kendala yang dihadapi pihak Kejaksaan Negeri Malang dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana Pembebasan Bersyarat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Pembebasan Bersyarat yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang;
- b. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pengawasan Pembebasan Bersyarat yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang;
- c. Untuk mengetahui kendala pihak Kejaksaan terhadap pelaksanaan pengawasan narapidana Pembebasan Bersyarat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan untuk penulis terkait pengawasan pidana bersyarat yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang, sebagai syarat untuk penulis menyelesaikan tugas akhir untuk meraih gelar S1 Ilmu Hukum

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat untuk pengetahuan terkait pengawasan pidana bersyarat yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang

c. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat terkait putusan pidana bersyarat

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan untuk informasi dan telaah terkait pembinaan dan pengawasan pidana bersyarat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau pandangan bagi Kejaksaan, Pemerintah, maupun akademisi terkait pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, serta untuk pengembangan ilmu Hukum Acara Pidana

1.6 Metode Penelitian

Agar penelitian skripsi dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Berdasarkan hal tersebut maka, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum Empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian lapangan. Dimana penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam terhadap objek permasalahan tertentu yang membutuhkan sebuah analisa yang komprhensif dan bersifat menyeluruh.³

Dalam penelitian ini penulis mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeru Malang dalam pelaksanaan Putusan Bebas Bersyarat terhadap narapidana yang selanjutnya dikaitkan dengan teori hukum dengan melihat fakta yang ada di lapangan terhadap objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara menguraikan dan membrikan analisa terhadap obyek penelitian, dengan maksud untuk memberikan data yang berkaitan dengan permasalahan dan judul penelitian secara rinci kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁴

Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Malang dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarta bagi Narapidana.

³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Bina Aksara, Jakarta, 1999, hal. 11

⁴ H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 105.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena penulis pernah melakukan kegiatan Magang di instansi tersebut serta lembaga ini juga mempunyai kewenangan terhadap pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat bagi narapidana.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui penelitian yang dilakukan di lapangan terkait berapa jumlah data yang diperoleh, serta keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pengambilan data Primer ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan permasalahan ini yaitu Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan dibedakan dalam 3 bahan antara lain :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu kaidah atau dasar hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan serta segala peraturan yang bersangkutan dengan penelitian diatas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung data sekunder itu sendiri seperti buku-buku hukum, penelitian terdahulu, jurnal hukum, artikel hukum serta bahan lain yang mendukung terkait permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus Hukum dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan data yang lengkap dengan maksud agar penelitian memiliki data yang benar-benar valid untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi maupun fakta-fakta yang ada di lapangan.⁵ Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Studi Lapangan

1) Observasi

Metode Observasi ini dilakukan guna untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang diangkat serta melihat bagaimana kenyataan

⁵ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Lanarka Publisher, Yogyakarta, 2007, hal. 57.

yang terjadi di lapangan. Dengan metode observasi kita dapat memperoleh informasi mengenai kenyataan yang ada di lapangan dengan kehidupan sosial yang sulit di peroleh dengan metode yang lain.⁶

2) Wawancara (*Intrerview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan oleh dua orang yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diangkat terkait penelitian hukum di atas. Penulis disini melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang.

3) Dokumentasi

Studi Dokumen merupakan pengumpulan data berupa catatan atau dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan terhadap penelitian baik berupa laporan tahunan, tabel, yang kemudian dikaji sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 106.

7. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan teknik analisis Deskriptif kualitatif, yang merupakan analisis yang bersifat menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku serta analisis data berdasarkan pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil studi kepustakaan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan terdiri dari IV Bab yakni :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi Latar Belakang yang mejadi dasar meupun alasan pemikiran penulis utnuk mengangkat masalah yang berkaitan denagn persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, serta tinjauan umum mengenai Tinjauan umum tentang Narapidana, Hak dan Kewajiban Narapidana, Teori Pemidanaan, Tinjauan umum tentang Pembebasan Bersyarat, dan Tinjauan Umum tentang Kejaksaan RI yang berakaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis akan menjelaskan tahapan penyelesaian yang muncul, dalam hal ini disajikan pembahasan mengenai jawaban atas perumusan masalah yang dipaparkan. Terkait dengan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat serta bagaimana efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan.

Bab IV : PENUTUP

Dalam bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan serta saran-saran yang disampaikan oleh penulis .

